



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **DEDI MULYADI**

Jabatan : **GUBERNUR JAWA BARAT**

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR JAWA BARAT

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
GUBERNUR JAWABARAT,

DEDI MULYADI



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan Tinggi	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,75 persen
2	Terkendalinya Stabilitas Harga Daerah Jawa Barat	Tingkat Inflasi	1,5 - 3,5 persen
3	Meningkatnya Kinerja BUMD	Persentase BUMD Sehat	81,08 persen
4	Regulasi Daerah Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	90,23 poin
5	Meningkatnya Efektifitas Dukungan Kebijakan Terhadap Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Daerah	77,43 poin
6	Kinerja Perangkat Daerah Mencapai Target	Persentase Perangkat Daerah dengan Deviasi Kinerja $\geq 0\%$	63,51 Persen
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	90,31 Poin
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Jawa Barat	Indeks Pelayanan Publik	4,77 poin
9	Kelembagaan Agile	Nilai Evaluasi Kelembagaan	73,093 poin
10	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IRB Kategori A	92 persen
11	Pelaporan Kinerja Pemda Berdampak pada Akselerasi Kinerja Pembangunan	Nilai SAKIP Pemda Dimensi Pelaporan	13,61 poin
12	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tinggi

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 501.684.269.048,-	APBD
2.	Penataan Organisasi	Rp. 559.380.000,-	APBD
3.	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 270.000.000,-	APBD
4.	Kesejahteraan Rakyat	Rp. 13.722.535.430,-	APBD
5.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 1.680.240.000,-	APBD
6.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 4.187.294.840,-	APBD
7.	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 928.314.375,-	APBD
8.	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 30.000.000,-	APBD

Bandung, 27 Januari 2026

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR JAWA BARAT

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

